

**PENGARUH IMPLEMENTASI *SPECIAL ECONOMIC ZONE* BATAM BINTAN
KARIMUN TERHADAP PENINGKATAN INDUSTRI PARIWISATA DI
KABUPATEN BINTAN PADA TAHUN 2012-2014**

By: Gita Indira Puspita

Onesix93@yahoo.com

Supervisor: **Faisyal Rani S.IP MA**

Library of Riau University

Department of International Relation
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

The research present describe the influence of implementation Special Economic Zone in Batam Bintan Karimun towards increase of tourism industry in Bintan Regency in 2012-2014. Special economic zone are dealed in 2007, before implementation special economic zone, Batam are the teritory that implemented of free trade zone. Implementation of special economic zone have purpose to increase a economic growth in teritory border especially for Batam Bintan Karimun.

The research use the methode are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research use location in Bintan Regency and researcher collect data from books, government regulation, journal, mass media, website. This research use neo liberalism perspective with the concept of tourism.

The conclusion of this research are influence of implementation Special Economic Zone in Batam Bintan Karimun towards tourism in Bintan Regency are increase of transprotation in Bintan such as road, bridge and airport, and increase of investations value and international tourism event in integrated tourism Lagoi area likes Bintan Triathlon, Tour de Bintan, Fishing Festival and Bintan Mountain Trecking and Durian Party.

Keywords: *influence, implementation, special economic and tourism.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik internasional yang menganalisis tentang pengaruh implementasi *Special Economic Zone* Batam Bintan Karimun terhadap

peningkatan industri pariwisata di Kabupaten Bintan pada tahun 2012-2014. Secara konseptual, *Special Economic Zone* (SEZ) merupakan bukti perdagangan antara Indonesia dan Singapura yang menyangkut penggunaan pulau Batam,

pulau Karimun, dan pulau Bintan dibawah kerjasama kedua negara dalam mengembangkan perekonomian.

Pemerintah Pusat telah memperluas kawasan industri di Kepulauan Riau dengan memantapkan Batam, Bintan, dan Karimun menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (*Special Economic Zone*) dalam bentuk *Free Trade Zone (FTZ)*. Sejarah FTZ atau dulu lebih dikenal dengan *Export Proccesing Zone* atau juga *Free Port* adalah suatu kawasan dimana barang dapat mendarat, ditangani, di manufakturkan, atau remanufakturkan, dan di re-ekspor tanpa adanya intervensi oleh pihak pabean. Dalam konteks pembangunan wilayah atau kawasan, pembentukan *SEZ* dapat dipandang sebagai upaya memanfaatkan potensi strategis yang dimiliki suatu wilayah untuk mendorong percepatan perkembangan perekonomian di wilayah tersebut, melalui pemberian berbagai insentif dan kemudahan untuk melakukan produksi (industri) dan bisnis lain bagi para investor.

Seluruh kegiatan produksi maupun bisnis lain yang dilakukan di wilayah *SEZ* diatur melalui kebijakan khusus sehingga output yang dihasilkan dari aktifitas ekonomi diharapkan memiliki keunggulan komparatif yang lebih baik. Selain perluasan kesempatan kerja dan berusaha, keberadaan *SEZ* diharapkan membawa dampak positif terhadap kinerja perekonomian baik ditingkat daerah maupun pusat. Khususnya dalam aspek peningkatan penerimaan pendapatan pemerintah dan produktivitas sektor. Selain itu, perluasan pengembangan *SEZ* di berbagai daerah diharapkan juga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Kebijakan di berlakukannya kawasan ekonomi khusus (*SEZ*), menimbang banyak harapan baru bagi

masyarakat yang tinggal dikawasan salah satunya Bintan. Tujuan dibentuknya *SEZ* adalah suatu sistem ekonomi keberpihakan pada masyarakat kecil dan bukan hanya sekedar kebutuhan politis.

Pasca terbentuknya *FTZ* di Batam, investasi pada tahun 2010 meningkat 180.000 million US\$. Hal ini menguatkan kebijakan strategi pemerintah untuk menangkap peluang investasi asing masuk ke kawasan *FTZ* dan membuka lapangan kerja seluas luasnya. *Free Trade Zone* dalam kerangka *Special Economic Zone* yang diterapkan di Kepulauan Riau salah satunya adalah kepulauan Bintan yang merupakan sebagai kiat atau strategi untuk menghadapi persaingan ekonomi dengan negara lain. Secara Geografis Pulau Bintan terletak 10 km disebelah timur Pulau Batam dan memiliki luas wilayah 1.100 km². Tambelan terletak 190 mil disebelah timur Pulau Bintan dan memiliki luas wilayah 164.9 km². Dengan terbentuknya kota tanjungpinang sebagai wilayah administratif menuntut adanya persiapan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau untuk menentukan pusat pemerintahannya.

Ruang lingkup penelitian yang digunakan untuk memperjelas pemaparan penulis mengenai “Pengaruh implementasi *Special Economic Zone* terhadap peningkatan industri pariwisata di Kabupaten Bintan tahun 2012-2014” adalah dimulai dari pengesahan kawasan *Special economic zone* di wilayah Batam Bintan dan Karimun. Namun tidak menutup kemungkinan penggunaan data-data yang relevan dalam masa-masa yang lain sejauh data tersebut dapat mendukung penelitian.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah

penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.¹

Pada penelitian ini penulis memakai perspektif Neo-Liberalisme. Pada prinsip Ekonomi yang juga dikenal sebagai ekonomi neo liberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir abad kedupuluh, sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neo klasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karna akan mengarah pada penciptaan distorsi dan high cost ekonomi yang kemudian akan berujung pada tindakan poruktif. Menurut pengertian ini peran negara atau

pemerintah hanya menjadi pelengkap atau pengganti dari pemain-pemain bisnis utama dimana tugasnya adalah menyediakan dan mengusahakan tertib politik dan hukum untuk sebesar-besarnya. Penelitian ini memakai level analisis negara unit negara. Merupakan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Negara Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Pentingnya Pengembangan Pariwisata Spillane (1993), mengutip pernyataan IUOTO (*International Union of Official Travel Organization*), menyatakan delapan alasan pengembangan pariwisata yaitu:

1. Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun international,
2. Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya,
3. Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi,
4. Pemerataan kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan di destinasi wisata,
5. Penghasil devisa,
6. Pemicu perdagangan international,
7. Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, serta
8. Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.

¹ Jemadu, Aleksius. 2007. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Jakarta. Graha Ilmu

Kepariwisata menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pesatnya pertumbuhan pariwisata dan potensinya mendorong banyak negara memanfaatkannya sebagai alat pembangunan. Interaksi langsung antara wisatawan, para pengusaha pariwisata, masyarakat di mana wisatawan berkunjung dan pemerintah setempat. Interaksi ini secara langsung melibatkan kegiatan yang menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, pariwisata sebagai pemicu perubahan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, mempunyai energi dobrak sangat besar yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya.

Besarnya pertumbuhan pariwisata telah mendorong para ahli untuk melakukan studi tentang dampak pariwisata yang dimulai sejak akhir tahun 1970-an⁴. Penelitian difokuskan pada upaya bagaimana mengukur dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Contohnya, penelitian Sebastian dan Rajagopalan meneliti peluang penciptaan kesempatan kerja dari pariwisata. Selain itu, masyarakat lokal lebih cenderung menganggap pariwisata sebagai alat untuk mengurangi pengangguran karena aktivitas pariwisata menciptakan peluang pekerjaan baru yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan individu, masyarakat dan pemerintah.

⁴ Sebastian, L.M., Rajagopalan, P. (2009) Socio-cultural transformations through tourism: A comparison of residents' perspectives at two destinations in Kerala, India, *Journal of Tourism and Cultural Change*, no.7(1), pp.5-21

Namun merupakan tantangan dalam mengukur dampak ekonomi pariwisata karena sebagian sifat pariwisata terfragmentasi, yakni mencakup berbagai industri, dan sebagian tidak adanya output yang jelas. Hal ini terlihat adanya kesulitan pemerintah dalam mengidentifikasi manfaat pariwisata ke dalam account dibandingkan dengan menentukan output dari industri tradisional yang jauh lebih mudah.⁵ Pariwisata dianggap mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Pengeluaran pariwisata tergantung pada kondisi sosial, ekonomi dan faktor lain. Nilai tukar mata uang sangat berpengaruh terhadap pengeluaran wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Penggunaan lahan untuk infrastruktur termasuk jalan dan lahan parkir. Kondisi ekonomi suatu negara, akan berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakatnya dan berdampak pada penundaan berwisata sehingga jumlah wisatawan menurun.

Pesatnya pertumbuhan pariwisata dan potensinya mendorong banyak negara memanfaatkannya sebagai alat pembangunan. Interaksi langsung antara wisatawan, para pengusaha pariwisata, masyarakat di mana wisatawan berkunjung dan pemerintah setempat. Interaksi ini secara langsung melibatkan kegiatan yang menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, pariwisata sebagai pemicu perubahan ekonomi, sosial, budaya

⁵ The Tourism Satellite Account (TSA), built on an Input-Output table, has been one solution for governments. Lih. Spurr (2006) untuk lebih detail tentang TSA

dan lingkungan, mempunyai energi dobrak sangat besar yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya. Kontribusi pariwisata secara langsung dihasilkan melalui sektor pariwisata primer seperti akomodasi/penginapan (*lodging and accomodation services*), makan dan minuman (*food and beverages services*), transportasi, hiburan, dan perdagangan ritel. Stynes, menganalisis dampak ekonomi dengan menelusuri aliran uang yang dibelanjakan wisatawan. Aliran pertama (*direct impact*) adalah untuk perusahaan dan instansi pemerintah yang menerima pembayaran dari wisatawan. Selanjutnya, uang mengalir melalui aktivitas ekonomi sebagai:

1. Pembayaran dari perusahaan dan instansi pemerintah kepada pemasok,
2. Gaji dan upah bagi mereka yang menyediakan tenaga kerja untuk pariwisata atau industri pendukung, dan
3. Berbagai pajak pemerintah dan biaya yang harus dibayar oleh para wisatawan, perusahaan dan rumah tangga.

Pada umumnya para ekonom membedakan ketiga dampak tersebut, namun dampak ekonomi pariwisata secara total merupakan penjumlahan dari dampak langsung, tidak langsung dan dampak ikutan (*induksi*) dalam suatu wilayah. Dampak tidak langsung dan dampak ikutan seringkali disebut dampak sekunder. Ukuran dampak ekonomi yang sering digunakan adalah output kotor, penjualan, pendapatan, pekerjaan, atau nilai tambah. Dalam menganalisis dampak sosial pariwisata, penting untuk difahami faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap dampak sosial. Faktor-faktor

tersebut akan dijadikan pertimbangan pada saat mengukur dampak sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Budaya (*Culture*).
2. Keterlibatan dalam Industri.
3. Lokasi.
4. Keterlibatan Warga Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata.
5. Interaksi dengan Wisatawan.
6. Karakteristik Demografi (*Jender, Usia, Pendidikan dan Etnis*).
7. Kebijakan Ekonomi Lokal (*State of the local economic*).
8. Fase dalam Daur Hidup Destinasi (*Destination Area Life Cycle*).

Tingkat Pengetahuan Masyarakat. Faktor lain yang memengaruhi dampak sosial pariwisata adalah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pariwisata. Semakin luas pengetahuan masyarakat akan cenderung berinteraksi secara positif terhadap wisatawan sehingga keadaan sosial masyarakat akan cenderung lebih baik. Masyarakat akan memanfaatkan pengembangan pariwisata sebagai media transformasi nilai-nilai universal dan memproteksi nilai-nilai kearifan lokal (*local indigenous*) sehingga tujuan pengembangan destinasi dapat tercapai secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian adalah deskriptif yang

selaras dengan pendapat Sugiyono (2005), yaitu penelitian yang mengungkap atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Moleong (2002: 190), Penelitian kualitatif diartikan yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian *library research*. Teknik pengumpulan data dari literatur berupa buku-buku, majalah-majalah surat kabar dan kunjungan ke situs internet serta sumber lain yang menunjang penelitian. Dokumentasi adalah sumber informasi berupa bahan – bahan tertulis atau tercatat berupa arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”. Teknik analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki kekhususan secara geografis karena berbatasan dengan negara tetangga sehingga merupakan pintu masuk lintas batas antara Indonesia, Singapura, Malaysia dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 252.602 Km² dengan luas perairan 242.497 Km² (96%). Provinsi Kepri yang wilayahnya didominasi dengan

perairan merupakan daerah lintas kepulauan yang menjadi lintasan strategis jalur perekonomian, perdagangan, pariwisata, industri dan investasi.² Dari segi sumber daya alam Kepri memiliki pertambangan, gas alam. Dengan kondisi wilayah 96% lautan mendukung bagi pengembangan usaha budidaya perikanan dan pariwisata. Dengan potensi wilayah Kepri yang besar pemerintah menciptakan kawasan ekonomi khusus atau disebut juga FTZ. *Free Trade Zone* adalah wilayah dimana ada beberapa hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota dihapuskan dan mempermudah urusan birokrasi dengan harapan menarik bisnis baru dan investasi asing. Pelaksanaan FTZ di wilayah Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang adalah amanat yang terkandung dalam undang-undang Nomor 44 tahun 2007 serta peraturan pelaksanaan yang berada dibawahnya. Sebagai amanat undang-undang, maka menjadi kewajiban bagi setiap instansi terkait untuk melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten.

Secara adminitrasi Kabupaten Bintan termasuk dalam Provinsi Kepulauan Riau – Indonesia, dengan luas wilayah 88.038,54 Km², terdiri dari 1,49% luas daratan dan 98,51% adalah lautan.³ Disamping itu Kabupaten Bintan saat ini memiliki 240 buah pulau besar dan kecil, yang sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian khususnya usaha perkebunan. Sebelumnya di Kabupaten Bintan hanya ada 119 buah perusahaan. Terdiri atas 111 PMA dan 8 PMDN pada

² Kadin-Indonesia. “Waspada Daya Saing Nasional”. Hal.21-22. Diakses dari www.kadin-indonesia.or.id pada tanggal 01 Maret pukul 17.18 WIB

³ Badan Pusat Statistik. 2014. *Bintan dalam Angka*. BPS Kabupaten Bintan.

tahun 2009. Namun setelah diberlakukan Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka banyak para investor berdatangan menanamkan modal mereka diberbagai bidang usaha. Hingga saat ini telah terdaftar 134 perusahaan yang berinvestasi baik skala kecil maupun besar, dan 963 perusahaan swasta murni. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007. Dimana cakupan wilayah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bintan seluas 62.017,20 Ha meliputi :⁴

1. Kawasan FTZ Bintan Bagian Utara seluas 58.750,60 Ha
2. Kawasan FTZ Industri Pulau Anak Lobam seluas 678,20 Ha
3. Kawasan FTZ Industri Galang Batang seluas 1.775,80 Ha
4. Kawasan FTZ Maritim Bintan Timur seluas 812,60 Ha

Dari sekitar 62.017,20 Ha luas kawasan PBPB Bintan tersebut, saat ini sekitar 15.000 sd 20.000 Ha lahan masih berstatus hutan lindung atau catchment area (daerah resapan air); seluas 23.000 Ha sudah menjadi kawasan wisata internasional Lagoi yang dikelola tersendiri oleh perusahaan PMA dengan *core* wisata pantai dan golf. Kawasan wisata ini juga didukung oleh prasarana pelabuhan penyeberangan Pelabuhan Bandar Bentan Telani Lagoi, yang melayani jalur lokal dan internasional. Sedangkan seluas 4.000 Ha merupakan kawasan industri Lobam.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bintan meminta pemerintah pusat mengkaji ulang perubahan fungsi

hutan lindung di Kabupaten Bintan. Perubahan status hutan lindung sangat penting bagi investor karena terkait dengan kepastian status lahan yang akan digunakan untuk investasi. Berdasarkan Perpres No. 87 Tahun 2011 tentang RTR Kawasan Batam, Bintan dan Karimun; kawasan PBPB BBK mencakup 26 kecamatan yang 7 kecamatan diantaranya termasuk sebagian wilayah Kabupaten Bintan, yakni:

- Sebagian Kecamatan Seri Kuala Lobam,
- Sebagian Kecamatan Bintan Utara,
- Seluruh Kecamatan Teluk Secong,
- Sebagian Kecamatan Teluk Bintan,
- Sebagian Kecamatan Toapaya,
- Sebagian Kecamatan Gunung Kijang, dan
- Sebagian Kecamatan Bintan Timur.

Dengan demikian kawasan PBPB Bintan meliputi ke 7 lokasi tersebut di atas dengan struktur ruang kawasan PBPB Bintan yang terdiri atas sistem pusat kegiatan (PK) primer yakni:⁵

1. Pusat Kegiatan industri berorientasi ekspor

Kawasan Industri Galang Batang di Kec. Gunung Kijang, Kawasan Industri Lobam di Kec. Bintan Utara; dan Kawasan Industri Maritim Bintan Timur di Kec. Bintan Timur.

Fungsi utama :

Pengembangan kawasan industri skala besar.

Fungsi pendukung : Sebagai simpul transportasi, permukiman

⁴ *Ibid*,

⁵ Budi Santoso, "Tinjauan Dari Perspektif Departemen Perdagangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus", Diskusi Internal dengan Tim Peneliti P3DI, Jakarta 4 April 2008.

karyawan, perdagangan dan jasa lokal.

2. Pusat Kegiatan pariwisata mancanegara & domestik

Kawasan Wisata Lagoi di Kec. Teluk Sebong, Kawasan Wisata Pengujan-Kuala Sempang di Kec. Sri Kuala Lobam, Kawasan Wisata Trikora di Kec. Gunung Kijang, dan Kawasan Wisata Sakera di Kec. Bintan Utara.

Fungsi utama :

Pengembangan pariwisata.

Fungsi pendukung :

Sebagai permukiman dan simpul transportasi

penumpang.

3. Pusat Kegiatan perdagangan dan jasa

Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Bandar Seri Bentan di Kec. Teluk Bintan, dan Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Tanjung Uban di Kec. Bintan Utara.

Fungsi utama :

Perdagangan dan jasa internasional

Fungsi pendukung :

Permukiman, simpul transportasi penumpang, dan

wisata belanja.

4. Pusat Kegiatan transportasi simpul transportasi laut

Pelabuhan Bandar Sri Udana dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kec. Bintan Utara, Pelabuhan Bandar Seri Bentan di Kec. Teluk Bintan, dan Pelabuhan Kijang di Kec. Bintan Timur.

Fungsi utama :

Transportasi

Fungsi pendukung :

Pelayanan perpindahan penumpang dan barang.

5. Pusat Kegiatan pertahanan dan keamanan negara

Mentigi di Kec. Bintan Utara, Gunung Bintan Kecil di Kec. Teluk Sebong, dan Tanjung Berakit dan Tanjung Sading di Kec. Teluk Sebong.

Fungsi utama :

Pertahanan dan keamanan negara.

Fungsi pendukung :

Menjaga kedaulatan NKRI yang meliputi

pertahanan dan keamanan

laut serta udara.

6. Pusat Kegiatan kesehatan

Kawasan Bandar Ser Bentan di Kec. Teluk Bintan, dan Kawasan Perkotaan Tanjung Uban dan Kawasan Seri Kuala Lobam di Kec. Bintan Utara.

Fungsi utama :

Kesehatan berkualitas internasional

Fungsi pendukung :

Penyediaan pelayanan perkotaan.

Adapun pengaruh implementasi *special economic zone* terhadap peningkatan industri pariwisata di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Kabupaten Bintan

Pengembangan Bintan sebagai salah satu wilayah kawasan ekonomi khusus diikuti dengan dibentuknya Badan Pengusahaan Kawasan Bintan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan dengan Nomor : Kpts / 04 / DK / VIII / 2008 tanggal 23 Agustus 2008. Kemajuan sarana dan prasarana khususnya di bidang perhubungan baik udara, darat maupun laut, akan membawa dampak yang sangat besar dalam menunjang percepatan pengembangan dan pembangunan Kawasan Bintan Wilayah Kab. Bintan

terutama di sektor pariwisata, industri, perikanan serta perdagangan dan jasa. Keberadaan infrastruktur yang baik, maka hubungan antar daerah akan mudah dan lancar terutama dalam hal pendistribusian penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dan pemasaran hasil produksi baik untuk dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor, dimana hal ini akan membawa dampak positif bagi pengembangan Kawasan Bintan Wilayah Kab. Bintan pada masa yang akan datang.

Sarana dan prasarana jalan di Kabupaten Bintan tergolong cukup, sebagian jalan sudah beraspal hanya saja belum bisa menjangkau pedalaman (daerah perkebunan dan industri). Jaringan jalan raya di Bintan di klasifikasikan dalam 2 (dua) kategori yaitu jalan Provinsi yang rata-rata sudah beraspal dan jalan kota sebagian sudah beraspal dan sebagian masih berupa jalan tanah yang berpasir. Akan tetapi, khususnya pada area pedalaman (menuju perkebunan dan industri) sarana dan prasarananya masih sangat terbatas, dimana sebagian besar masih berupa jalan tanah yang berpasir. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kab. Bintan, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Pusat berkaitan dengan daya tarik investasi. Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk mem-perlancar kegiatan perekonomian. Dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan, maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain. Panjang jalan kabupaten di Bintan pada tahun 2011 mencapai 737,024 km, yang terdiri dari jalan yang beraspal 701,412 km, jalan kerikil 0 km dan jalan tanah 35,612 km.

Tabel 4.1 Panjang Jalan dirinci Menurut Jenis Permukaan dan Status Jalan di Kabupaten Bintan, 2011(km)

Status Jalan	Jenis Permukaan			Jumlah
	Beraspal	Tidak Beraspal		
		Kerikil	Tanah	
Jalan Negara	10,712	0	0	10,712
Jalan Provinsi	135,00	0	0	135,00
Jalan Kabupaten	555,70	0	35,612	591,312
2011	701,412	0	35,612	737,024
2010	511,562	0	50,800	596,362
2009	494.312	0	47,150	541,462
2008	1.057,14	34,00	530,97	1.622,11
2007	1.041,19	34,00	515,81	1.591,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan

Berdasarkan data tabel diatas, maka perkembangan jalan di Kabupaten Bintan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bintan merupakan salah satu alternatif jalan darat menuju Kota Tanjung Pinang.

2. Peningkatan Investasi Asing di Kabupaten Bintan

Perkembangan investasi merupakan peningkatan jumlah perusahaan yang diiringi dengan meningkatnya realisasi investasi disuatu daerah. Struktur perekonomian Kabupaten Bintan ditopang oleh sektor kegiatan

pariwisata dan industri pengolahan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan investasi sampai sekarang, peran investasi di Kawasan FTZ Bintan dirasakan masih belum meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah secara optimal. Oleh karena itu untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan investasi, disamping tersedianya sarana dan prasarana, baik potensi sumber daya alam yang ada dan letak kawasan yang sangat strategis, perlu adanya kerjasama antar instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan itu sendiri.

Peningkatan nilai realisasi investasi yang disampaikan oleh perusahaan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan harapan yang saling membantu dan mendukung bagi perkembangan dan pertumbuhan pendapatan di daerah. Salah satu kebijakan yang sedang digalangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan adalah adanya peningkatan kemampuan dan keterampilan manajerial maupun teknologi dan tenaga kerja melalui proses ahli teknologi perusahaan PMA serta terciptanya kesempatan usaha dan kesempatan kerja baru guna mengatasi gejolak sosial seperti pengangguran. Salah satu partisipasi dari investor PMA seperti data grafik diatas, dimana nilai investasi semakin meningkat, tentunya dengan peningkatan investasi akan terserap tenaga kerja yang lebih banyak, yang berakibat pada berkurangnya angka pengangguran

Sasaran tersebut di atas telah digambarkan pada diagram perkembangan investasi persektor perusahaan khususnya perusahaan asing Tahun 2009 di Kawasan FTZ Bintan. Dimana sektor industri mendominasi seluruh perusahaan yaitu dengan jumlah 34 perusahaan dengan rencana investasi sebesar US\$.

761,752,923 dan realisasi investasi US\$. 57,160,309. Diikuti dengan sector perhotelan sejumlah 29,73% atau 33 perusahaan dan nilai rencana investasi sebesar US\$. 367,259,929 sedangkan realisasi investasi US\$. 87,147,667. Jika diperhatikan dari perkembangan investasi persektor perusahaan PMDN di Kawasan FTZ Bintan sangat minim jumlahnya dibandingkan perusahaan asing sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dengan jumlah perusahaan 8 proyek menciptakan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 59.918.400.000. Perusahaan PMDN pada umumnya bergerak dibidang perkebunan dan perhotelan. Masing-masing dari sektor perkebunan menyumbangkan Rp. 25.648.400.000,- dan sektor perhotelan sejumlah Rp. 29.000.000.000,-.

3. Peningkatan Kegiatan Pariwisata Internasional di Kabupaten Bintan

Di Kabupaten Bintan sendiri untuk pembangunan pariwisata dikembangkan dua Konsep pembangunan yaitu Kawasan Lagoi dengan pariwisata untuk kelas menengah ke atas. Dan kawasan Pantai Timur Bintan (Berakit Trikora-Kawal) pembangunan pariwisata kemasyarakatan untuk mengakomodir wisatawan kelas menengah ke bawah. Oleh sebab itu, untuk Perusahaan yang akan beroperasi di Kabupaten Bintan wajib menaati Peraturan daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Selain membagi pembangunan kawasan pariwisata di Kabupaten Bintan dengan segmentasi pengunjung. Pembangunan kawasan Pariwisata di Kawasan Bintan maupun bangunan lainnya di Kabupaten Bintan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang dan Wilayah kabupaten Bintan 2011-2031 dan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung. Kabupaten Bintan sendiri telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031. Dalam Perda berisi rencana pembangunan Bintan secara fisik selama 20 tahun sejak peraturan ini di undangkan yaitu dari tahun 2011 hingga 2031.

Kawasan Lagoi merupakan salah satu kawasan Strategis Kabupaten Bintan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031. Kawasan Strategis Kabupaten Bintan adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Bintan terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Pembiayaan Kawasan Strategis Kabupaten Bintan menurut pasal 42 ayat bahwa pembiayaan pengembangan kawasan strategis dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten Bintan serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana yang dibiayai bersama (sharing) baik antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antar Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bintan maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten Bintan, dan dana lain-lain yang sesuai dengan

peraturan perundangundangan yang berlaku.⁶

Kemudian pembangunan bandara khusus di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam yang disebutkan pada pasal 15 merupakan salah satu pembangunan fasilitas pendukung bagi pariwisata salah satunya pariwisata kawasan Lagoi. Dilihat dari pembiayaan pembangunan pariwisata di Lagoi, seperti jalan, air dan Listrik dibangun oleh PT. BRC selaku pemegang hak pengelola kawasan Lagoi. Dalam hal ini, kawasan Lagoi murni di kelola oleh PT. BRC tidak ada campur tangan Pemerintah dalam hal pembangunan maupun rencana pembangunan di kawasan Lagoi. Di karenakan PT. BRC telah mendapat hak khusus pengelolaan kawasan Lagoi seluas 23.000 ha.

Untuk pengelolaan lahan dilakukan oleh PT. BMW (Buana Mega Wisata). Perusahaan ini masih 1 Grup dengan PT. BRC. Selain itu perusahaan yang bergerak di kawasan Lagoi juga merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan hanya sebagian kecil yang swasta atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Peluang pariwisata di Kabupaten Bintan yang sangat banyak, serta kebijakan pembangunan yang telah dilakukan Kabupaten Bintan untuk mendorong memaksimalkan potensi pariwisata, untuk memaksimalkan PAD bintan maka Kabupaten Bintan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Oleh karena itu dengan adanya penetapan Kabupaten Bintan sebagai daerah kawasan ekonomi khusus, maka hal ini berdampak pada peningkatan investasi terutama di bidang pariwisata di

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan. Berikut ini merupakan kegiatan kepariwisataan internasional yang diadakan setiap tahunnya di kawasan wisata terpadu Lagoi Kabupaten Bintan, yaitu:⁷

a. Bintan Triathlon

Triathlon adalah multi event olahraga ketahanan yang terdiri dari berenang, bersepeda, dan berlari melewati berbagai jarak. *Participants* bersaing untuk mendapatkan waktu tercepat, dan total waktu penyelesaian keseluruhan, termasuk timed "*transisi*" antara individu berenang, bersepeda, dan lari komponen. Bintan Triathlon 2010 diselenggarakan pada Bulan Mei 2010, selama 2 hari di Nirwana Garden Resort, dengan jumlah participants secara keseluruhan 1500 orang, berasal dari 37 negara.

b. Tour de Bintan

Tour de bintan adalah event balap sepeda perdana yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bintan bekerjasama dengan Nirwana Garden Resort, Bintan Tourism Board dan event organizer Tribob. Ajang balap sepeda tour de bintan ini juga sebagai sarana untuk mengenalkan keindahan objek wisata di Bintan kepada dunia luar untuk menarik kunjungan wisata ke Bintan, sebagaimana yang di harapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan. Kegiatan ini di buka langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati Bintan Ansar Ahmad serta di dampingi oleh unsur muspida di wilayah Kabupaten Bintan. Tour de Bintan yang merupakan event perdana ini, disambut baik oleh pihak *United Cycling International* (UCI) dimana nantinya akan dinilai kelayakannya untuk ditetapkan sebagai kalender tahunan balap sepeda internasional. Sebanyak

kurang lebih 148 pembalap mancanegara turut serta mengikuti lomba balap sepeda "*tour de bintan*" di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ini.

Peserta dari manca negara yang mengikuti tour de bintan tersebut berasal dari sembilan negara di Asia, Eropa, Australia dan Amerika diantaranya dari Prancis, Inggris, Australia, New Zealand, Jepang, Italia, Amerika Serikat, German, Thailand, Malaysia dan Singapura. Ditambah 8 orang atlet yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti dari Tanjungpinang, Lingga, Batam dan Pekanbaru.

c. Fishing Festival

Bintan Fishing Festival merupakan salah satu atraksi/ event wisata yang dapat dikembangkan, mengingat perairan di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan potensi perikananannya sangat memungkinkan bagi dikembangkannya kegiatan lomba memancing sebagai salah satu atraksi wisata. Dimana tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Meningkatkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan laut yang telah memberikan manfaat kepada manusia.
- Memperkenalkan Desa Malang Rapat sebagai salah satu destinasi mancing yang ada di Kabupaten Bintan sehingga diharapkan bisa berdampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitarnya.
- Sebagai wadah bagi para pecinta mancing untuk menyalurkan hobinya.

Kegiatan Bintan Malang Rapat Fishing Festival ini diselenggarakan tepatnya pada setiap bulan Mei terdiri dari

⁷ *Ibid.*

400 peserta lokal dan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

d. **Bintan Mountain Trekking and Durian Party**

Bintan Mountain Trekking & Durian Party adalah salah satu event yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan berbasis ecotourism dimana para peserta akan berjalan melintasi Gunung Bintan dengan ketinggian 340 m dari permukaan laut, kemudian ditambah melewati rintangan outbound (memanjat dinding, merayap, jembatan gantung, dan lain – lain) dalam batas waktu tertentu. Kemudian setelah itu para peserta menikmati buah durian berasal dari kawasan gunung bintan yang telah disediakan. Event ini diselenggarakan selama 1 hari di Kawasan Gunung Bintan, meliputi 3 desa yaitu desa Bukit Batu, desa Enau dan desa Bukit Bekapur, dimana waktu pelaksanaan disesuaikan pada saat musim buah durian, jumlah peserta 150 orang, pada tanggal 27 Juni 2010.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh implementasi *Special Economic Zone* terhadap peningkatan industri pariwisata di Kabupaten Bintan tahun 2012-2014 adalah meningkatkan aktifitas pariwisata internasional di Kabupaten Bintan dan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007, kawasan Bintan ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan meliputi sebagian dari wilayah

Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Kawasan Industri Pulau Anak Lobam. Penetapan *Special economic zone* Kabupaten Bintan difokuskan pada pengembangan pariwisata skala internasional di Kabupaten Bintan. Beberapa pengaruh yang paling signifikan dalam penetapan *Special economic zone* Kabupaten Bintan terhadap pariwisata di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Kabupaten Bintan
2. Peningkatan Investasi Asing di Kabupaten Bintan
3. Peningkatan Kegiatan Pariwisata Internasional di Kawasan Wisata Terpadu Kabupaten Bintan, seperti: *Bintan Triathlon, Tour de Bintan, Bintan Mountain Trakking and Durian Party* serta *Bintan Fishing Festival*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Fredline, L., Jago, L., & Deery, M. (2003). *The development of a generic scale to measure the social impacts of events*. *Event Management*, 8, 23-37.
- _____. 2002. *Variations in residents' reactions to major motorsports events: why residents perceive the impacts of events differently*. *Event Management*, 7(2), 115-126
- Konstantinos Andriotis. 2006. *Hosts, guests and politics: Coastal Resorts Morphological Change*. *Anna ls of Tourism Research*, 33 (4), 1079–1098
- Sebastian, L.M., Rajagopalan, P. (2009) *Socio-cultural transformations*

through tourism: A comparison of residents' perspectives at two destinations in Kerala, India, Journal of Tourism and Cultural Change, no.7(1), pp.5-21

Soebagyo. 2012. Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia, dalam Jurnal Liquidity Vol.1, No.2. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila.

Anton M. Moelino, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2014. *Bintan dalam Angka*. BPS Kabupaten Bintan.

Bambang Marhijianto, 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang, Jakarta.

Jack C. Plano. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2*. Jakarta: Balai pustaka.

Jemadu, Aleksius. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu

Lexy J. Maleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan VIII*. Jakarta: Balai pustaka.

Santoso, Budi, "Tinjauan Dari Perspektif Departemen Perdagangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus", Diskusi Internal dengan Tim Peneliti P3DI, Jakarta 4 April 2008

The Tourism Satellite Account s" (TSA), built on an Input –Output table, has

been one solution for governments. Lih. Spurr(2006) untuk lebih detail tentang TSA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Kepelabuhanan Bintan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007, kawasan Bintan ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Website

One Stop Service in Sumatra Promotion Centre (SPC) Karimun, Kepulauan Riau Province, 2007, <http://bpidkep.riau.go.id/index.php?bahasa=english&bpid=halutama&link=pelayanan>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2015.

Sapta Nirwandar, 2011 Pembangunan Sektor Pariwisata: Di Era Otonomi Daerah, di unduh pada Februari 2011. <http://www.scribd.com/doc/35092726/440-1257> pembangunansektorpariwisata1

Kadin-Indonesia. "Waspada Daya Saing Nasional". Hal.21-22. Diakses dari www.kadin-indonesia.or.id pada tanggal 01 Maret pukul 17.18 WIB

Tulus Tambunan. “Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah”.Diakses dari www.Kadin-Indonesia.or.id